



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Irham Prima Rinaldi

2013310012

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Irham Prima Rinaldi

2013310012

Pembimbing

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Irham Prima Rinaldi
Nomor Pokok : 2013310012
Judul : Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
di Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 27 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris merangkap pembimbing

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

: 

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irham Prima Rinaldi

NPM : 2013310012

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2017



Irham Prima Rinaldi

ABSTRAK

Nama : Irham Prima Rinaldi

NPM : 2013310012

Judul : Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Bandung

Sistem pengadaan barang dan jasa berperan penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya, karena barang dan jasa dapat menunjang optimalisasi kerja instansi pemerintah. Berdasarkan data menunjukkan bahwa masih terdapat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung. Pada dasarnya setiap pemerintahan harus menerapkan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Dalam hal ini Jorge Lynch menyatakan bahwa perlu adanya indentifikasi aktor untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga perlu dilakukan analisis aktor – aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung. Hal tersebut diperkuat oleh Stephen Biggs dan Harriet Matsaert bahwa hubungan para aktor dapat mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Oleh karena itu perlu diadakan suatu penelitian kualitatif dengan menggunakan desain actor oriented tools pada pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belum teridentifikasi dengan jelas aktor – aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung, tetapi sudah terjadi hubungan antar aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung.

Kata kunci: Aktor, Hubungan, Pengadaan.

ABSTRACT

Name : Irham Prima Rinaldi

NPM : 2013310012

Title : Actor Analysis in Public Procurement at Bandung City

Public Procurement takes a big part in government to execute the function of the government itself, because public procurement can support optimization of work done by the government instance. According the data given it shows that there are still corruption occurring in public procurement system of Bandung city government. Basically, every government must apply principles of procurement of goods and services effectively, efficiently, transparently, open, contend, even, and accountable.

In this matter Jorge Lynch stated the importance of actor identification for executing public procurement. That makes actors analysis in public procurement of Bandung city government is necessary. This matter is also strengthened by Stephen Biggs and Harriet Matsuert that the relations of actors can affect the process of public procurement.

Therefore, qualitative research using actor oriented tools design in public procurement in Bandung city government need to be conducted. The result of this research stated that it is not identified clearly yet the actors in procurements of goods and services of Bandung city government, but it is already happening the relations between actors in public procurement in Bandung city government.

Keyword: Actor, Relation, Procurement

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Bandung”.

Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang mungkin penulis buat. Setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah senantiasa menjadi tempat pertama bagi penulis untuk mencurahkan berbagai hal. Untuk kedua orangtua penulis, Mama Tercinta Dr. Yuli Aslamawati, MPd., Psikolog, Papa Tercinta Teddy Hernadi, ST, Kaka Tercinta Nuraini Fitri Kireina, S.Ikom dan Rembulan Martha Tiassuci S.AP terimakasih banyak atas segala sesuatu yang telah diberikan, cinta dan kasih sayang, serta kesabaran, doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Serta kepada Ibu Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, penulis sampaikan apresiasi dan

ucapan terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing dan selalu memberikan waktu dalam memberikan pengetahuan mengenai cara dan proses untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan benar, serta membantu penulis dalam memberikan makna mengenai topik Analisis Aktor dalam Pengadaan Barang dan. Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Andoko, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Ibu Ani Susana, Bapak Pius Suratman Kartasmita, Bapak Deni M, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, dan segenap Dosen Pengajar serta pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pembelajaran, baik moral maupun materil kepada penulis selama berada di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dicky Septianysah, Eggy Januar, dan Zahra Mulyanisa
5. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2011, 2012, 2013, dan 2014 terimakasih atas bimbingan, dukungan dan kerjasamanya.
6. Teman – teman seperjuangan bimbingan Puti dan Bugi terimakasih atas dukungannya

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, dimana pun kalian berada terimakasih banyak untuk segalanya.

Allah SWT akan membalas setiap orang yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bandung, Juli 2017

Irham Prima Rinaldi

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	3
1.1.2 Hubungan Aktor Pengadaan Barang dan Jasa	10
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.5 Sistem Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
1. Konsep <i>Public Procurement</i>	15
1.1 Pengertian <i>Public Procurement</i>	15
1.2 <i>Public Procurement System</i>	17
1.3 <i>Public Procurement Process</i>	22

	2. Konsep <i>Actor Public Procurement</i>	24
	2.1 Pengertian <i>Actor Public Procurement</i>	25
	2.2 Pengertian <i>Actor Oriented</i>	30
	2.3 <i>Actor Oriented Tools</i>	31
	2.3.1 <i>Actor Time Lines</i>	31
	2.3.2 <i>Actor Linkage Map</i>	33
	2.3.3 <i>Actor Linkage Matrix (ALM)</i>	33
	3. Model Penelitian	35
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	3.1 Tipe Penelitian	36
	3.2 Peran Peneliti	37
	3.3 Lokasi Penelitian	38
	3.4 Operasionalisasi Variabel	39
	3.5 Sumber Data	43
	3.6 Prosedur Pengumpulan Data	43
	3.6.1 Wawancara	44
	3.6.2 Studi Dokumen	44
	3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan	49
BAB IV	PROFIL PENELITIAN	51

4.1	Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung	51
4.2	Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung	55
4.3	Sejarah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bandung	57
4.3.1	Pelaksanaan Pengadaan Baarang dan Jasa Pertama Pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	58
BAB V	TEMUAN	59
5.1	Identifikasi Aktor	59
5.2	Hubungan Aktor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	61
5.2.1	Bentuk Hubungan Para Aktor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	62
BAB VI	PEMBAHASAN	65
6.1	Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa	65
6.2	Identifikasi Aktor	67
6.3	<i>Actor Time Lines</i>	67
6.4	<i>Actor Linkage Map</i>	78
6.5	<i>Actor Linkage Matrix</i>	95
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	98
7.1	Kesimpulan	98
7.2	Saran	99
	Daftar Pustaka	100
	Lampiran	105

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Wawancara	45
-----------	---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Struktur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah</i>	9
Gambar 4.1	<i>Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung Hasil Penetapan Raperda Tingkat Daerah 11 Oktober 2016 DPRD Kota Bandung</i>	55
Gambar 6.1	<i>Penjelasan Actor Time Line dari 2003 sampai 2010</i>	68
Gambar 6.2	<i>Penjelasan Actor Linkage Map Tahun 2003</i>	79
Gambar 6.3	<i>Penjelasan Actor Linkage Map Tahun 2006</i>	80
Gambar 6.4	<i>Penjelasan Actor Linkage Map Tahun 2010</i>	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat yang tiada hentinya dilanda kasus korupsi. Pada tahun 2012 terjadi dugaan mengenai adanya korupsi dana pembangunan gedung kantor perpustakaan kota Bandung. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasiintelijen) Umaryadi yang menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bandung dirugikan sebesar 3,9 miliar.¹

Pada tahun 2015 terjadi dugaan korupsi kembali pada pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang merugikan pemerintah Kota Bandung sebesar 545,5 miliar. Dugaan korupsi tersebut berasal dari pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk membangun stadion GBLA yang meliputi :

1. Ketidak sesuaian waktu pengerjaan dengan kontrak. Berdasarkan kontrak pada tahun 2011 pembangunan GBLA harus mencapai 23 persen. Tapi pada kenyataannya pemabangunan GBLA baru rampung 17 persen. Keterlambatan tersebut mempengaruhi pengerjaan stadion GBLA yang terlambat 6 bulan lebih lama dari kontrak.
2. Pembebanan biaya tidak sesuai atau kelebihan atau melebihi ketentuan. Berdasarkan hasil tender pengadaan barang dan jasa pembangunan Stadion GBLA, PT Adhi Karya terpilih menjadi pemenang tender dikarenakan usulan dananya untuk pembangunan GBLA merupakan usulan dana paling rendah dibandingkan dengan peserta tender lainnya yaitu hanya 495,94 miliar. Tapi pada hasil akhirnya setelah stadion GBLA rampung, pemerintah Kota Bandung harus mengeluarkan dana sebesar 1,1 triliun.

¹ 'TEMUAN KORUPSI BANDUNG' <http://www.antarafoto.com/peristiwa/v1337768101/temuan-korupsi-bandung>

3. Ketidackjeraan para pejabat pemerintah Kota Bandung dengan ancaman hukuman penjara. Berdasarkan dugaan korupsi dana pembangunan gedung kantor perpustakaan kota Bandung pada tahun 2012 dan dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada tahun 2015 menunjukkan ketidackjeraan para pejabat pemerintah atas hukuman penjara pada kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (SKPD) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ini penting bagi instansi pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahanya, karena barang dan jasa dapat menunjang optimalisasi kerja instansi pemerintah.² Terdapat empat jenis Pengadaan barang atau jasa pemerintah yaitu:³

1. Pekerjaan Kontruksi

Pekerjaan kontruksi adalah pengadaan pelayanan jasa profesional yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya serta keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (Brainware) dengan bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu yang disusun secara sistematis berdasarkan dengan kerangka acuan kerja pengguna jasa barang, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

2. Pengadaan Barang

Pengadaan barang meliputi benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang dapat berbentuk bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau disebut

² Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

³ 'Jenis Pengadaan' <https://b2g.lkpp.go.id/#>

dengan peralatan, yang dimana spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna barang atau jasa.

3. Jasa konsultasi

Jasa konsultasi adalah pengadaan jasa yang meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah pengadaan segala jenis pekerjaan atau penyediaan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (Skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

1.1.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Pada awalnya proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi. Berdasarkan wawancara dengan AR pegawai ULP kota Bandung,⁴ mengatakan bahwa pada pasal 4 ayat 2 proses pengadaan barang dan jasa diawali dengan membuat pengumuman sekurang-kurangnya di satu (1) media cetak tentang lelang pengadaan barang dan jasa dari SKPD, lalu membuka pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, kemudian dilakukan penjelasan dari panitia lelang SKPD bersangkutan tentang pengadaan barang dan jasa yang

⁴ Wawancara langsung dengan AR, pegawai ULP kota Bandung. Pada tanggal 20/09/2016, pukul 13.00 WIB.

hendak dilakukan. Setelah itu memasukan penawaran dari para peserta yang terdiri dari badan usaha atau usaha orang perseorangan, kemudian dilakukan evaluasi atas penawaran, dan akhirnya pengumuman pemenang.⁵ Biasanya proses ini dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing yang melakukan pengadaan barang dan jasa.

Kemudian dengan kemajuan teknologi dan informasi proses Pengadaan barang dan jasa berubah setelah keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan barang atau jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.⁶ Pengadaan barang atau jasa elektronik (*e-procurement*) dilakukan dengan dua cara yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik.⁷

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibentuklah

⁵ Menurut Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

⁶ Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁷ 'Tentang E-Proc' <https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang/01/11/2016>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memiliki tugas mengembangkan e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Indonesia. LKPP tersebut adalah lembaga Pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LKPP mewujudkan hal tersebut dengan membuat berbagai macam situs internet,⁸ yaitu:

1. INAPROC (Portal Pengadaan Nasional) sebagai pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
2. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), yang bertujuan untuk mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaannya.
3. MONEVOL (Monitoring Evaluasi Online) berfungsi untuk memfasilitasi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah /Institusi lainnya (K/L/D/I) dalam pelaporan untuk keperluan evaluasi dan pengawasan percepatan realisasi belanja serta perkembangan pengadaan barang atau jasa.
4. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

⁸ 'Pelayanan' <http://www.lkpp.go.id/v3/> (01/11/2016)

5. B2G (Business to Government) adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat luas khususnya mahasiswa ataupun pihak lain untuk melihat, mengenal dan memahami bagaimana menciptakan peluang usaha untuk ikut serta berpartisipasi aktif di dalam pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dengan sosialisasi, edukasi dan informasi tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah, berbasis situs website agar dapat mengakomodasi kebutuhan stakeholder Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
6. Portal e-Proc adalah aplikasi *electronic procurement* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Mendukung proses monitoring dan audit, Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
7. SIJABFUNGPEBJ (Sistem Informasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) adalah aplikasi perhitungan angka kredit (PAK) jabatan fungsional pengelola pengadaan barang atau jasa yang memiliki tujuan untuk membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.
8. *E-learning* adalah aplikasi pembelajaran pengadaan barang atau jasa secara online didalamnya terdapat beragam modul pelatihan(video, flash, pdf, slide dsb), didampingi oleh pengajar Training For Trainer (TOT) LKPP.
9. E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

10. ADP (Agresi Data Penyedia) merupakan sistem yang memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang.
11. *Smart Report* adalah rekapitulasi hasil pengolahan berbasis data SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang tersebar di seluruh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
12. Simpel (Sistem Informasi Pelatihan) adalah aplikasi untuk memberikan informasi tentang jadwal dan jenis pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan, pengetahuan dan perilaku kepada peserta latih tentang prosedur pengadaan barang atau jasa pemerintah, sehingga para peserta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
13. Sistem Informasi Sertifikasi adalah aplikasi yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan sertifikasi pengadaan barang atau jasa pemerintah yang profesionalisme dan kredibel dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta mengoptimalkan infrastruktur penunjang di bidang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
14. Portal Konsultasi adalah portal konsultasi LKPP yang terdapat database berisi pertanyaan maupun jawaban hasil dari konsultasi sebelumnya sehingga bisa dijadikan salah satu sumber referensi bagi panitia untuk membantu pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
15. E-pengaduan adalah aplikasi yang memberikan kemudahan untuk menyampaikan pengaduan bagi penyedia barang atau jasa dan juga masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan prosedur, praktek korupsi kolusi nepotisme (KKN) dalam melaksanakan pengadaan barang atau

jasa pemerintah.

16. *Vendor Directory* adalah aplikasi yang berfungsi untuk mempromosikan penyedia-penyedia dari seluruh Indonesia sehingga situs ini diharapkan mampu memudahkan K/L/D/I seluruh Indonesia untuk mengetahui penyedia di seluruh Indonesia dengan berbagai macam klasifikasi bisnis.
17. WBS PBJ (Whistle Blowing System Pengadaan Barang dan Jasa) adalah aplikasi yang berfungsi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang atau jasa dan untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa dengan meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.
18. Si ULP (Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan) adalah aplikasi yang memiliki tujuan untuk ULP di setiap K/L/D/I dapat menyampaikan data tingkat kematangan organisasi, profil ULP dan berkonsultasi terkait pengembangan organisasi ULP.

Dari 18 situs internet yang dikeluarkan oleh LKPP, kota Bandung menggunakan LPSE dan ULP untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Situs internet LPSE digunakan sebagai sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.

Penerapan e-procurement dimulai pada tahun 2008 dan telah berkembang dengan pesat hingga bulan Juni 2014. tercatat sebanyak 311.500

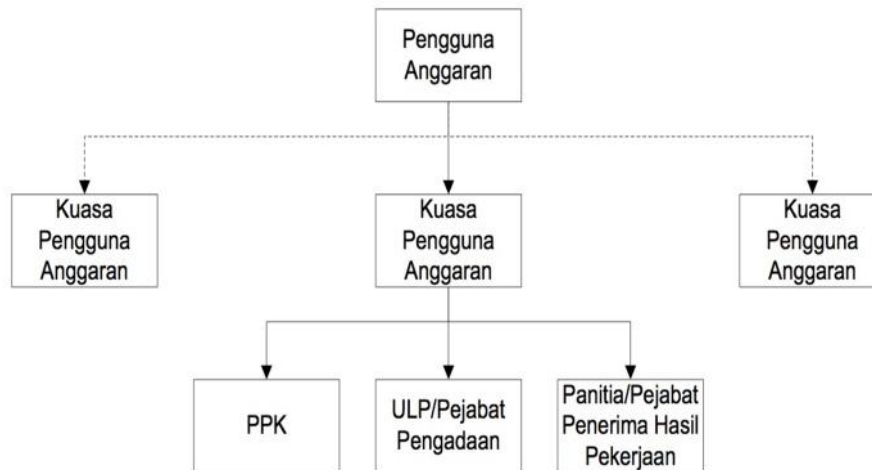
paket lelang dengan nilai pagu melebihi Rp 609 triliun yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah (K/L/D/I). E-Procurement ini berpotensi menghemat anggaran sebesar 70 triliun rupiah setiap tahunnya dan diharapkan dapat mencegah adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.⁹ Namun penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa nampaknya masih merupakan kasus korupsi yang banyak ditangani aparat penegak hukum. Hingga bulan November 2016, sebanyak 366 atau sekitar 78 persen jenis korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat terkait dengan kasus penyuapan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau e-procurement (e-proc). Jenis korupsi penyuapan yang ditangani KPK sebanyak 224 kasus atau sebanyak 48 persen. Lalu, jenis korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 142 kasus atau sekitar 30 persen.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa pemberlakuan *e-procurement* ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sistem e-procurement pemerintah terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Berikut adalah struktur organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah¹¹:

⁹ 'Audit Atas Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah'
<http://www.bpkp.go.id/investigasi/berita/read/13521/0/AUDIT-ATAS-PELAKSANAAN-LELANG-SECARA-ELEKTRONIK-DALAM-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-PEMERINTAH.bpkp>
(01/11/2016)

¹⁰ 'Kasus Yang Diusut KPK Didominasi Penyuapan Pengadaan Barang'
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/11/07/oga3y3365-kasus-yang-diusut-kpk-didominasi-penyuapan-pengadaan-barang> (14/11/2016)

¹¹ Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Indonesia



Gambar 1.1

Struktur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Dengan struktur organisasi eprocurement di atas, belum dapat menghilangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Agus Prabowo (kepala LKPP) bahwa KKN masih sangat rawan terjadi dalam e-procurement. Modus korupsinya yang sering ditemukan berupa pengadaan fiktif, kelebihan pembayaran, spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak, hingga ada pemahalan harga.¹²

1.1.2 Hubungan Aktor Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Bandung

Pemerintah kota Bandung dalam melakukan pengadaan barang dan jasa memerlukan pihak lain, karena tugas pokok pemerintah bukan untuk menghasilkan barang atau jasa, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pihak lain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang dapat menyediakan barang, menyediakan pekerjaan konstruksi, menyediakan jasa konsultansi atau

¹² 'LKPP: Proses Pengadaan Barang/Jasa Rawan KKN'
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/29/ofsc99365-lkpp-proses-pengadaan-barangjasa-rawan-kkn> (14/11/2016)

menyediakan jasa lainnya. Dalam hal ini penulis pernah terlibat langsung dalam proses e-procurement. Penulis menemukan bahwa badan usaha ataupun orang perseorangan yang terlibat dalam e-procurement memiliki tujuan untuk mencari keuntungan guna keberlangsungan usahanya dan juga membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, pegawai pemerintahpun terkadang tidak mau ketinggalan, sehingga mereka mencari celah ataupun cara agar mendapatkan keuntungan juga.

Berdasarkan wawancara dengan RD salah satu orang dalam Kelompok Kerja ULP kota Bandung¹³, bahwa seorang pegawai pemerintah yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dapat memonopoli suatu kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa tertentu, karena pegawai pemerintah tersebut lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Biasanya pegawai pemerintah menerima suap untuk memenangkan suatu badan usaha atau orang perseorangan. Hal ini di benarkan oleh pernyataan PS yang merupakan pemilik badan usaha¹⁴, bahwa badan usaha atau orang perseorangan merasa sangat terbantu dengan kesediaan pegawai pemerintah untuk menerima suap, sudah menjadi hal yang wajar untuk menyuap pegawai pemerintah agar memperlancar kemenangan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Badan usaha atau orang persoranganpun terkadang meminjamkan nama mereka kepada orang yang ingin mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, karena yang dapat mengikuti lelang hanya badan usaha atau orang perseorangan yang sudah terdaftar. Menurut JP perwakilan masyarakat¹⁵, dengan meminjam nama

¹³ Wawancara langsung dengan RD, Kelompok Kerja ULP kota Bandung. Pada tanggal 25/09/2016, pukul 13.00, WIB.

¹⁴ Wawancara langsung dengan PS, Pemilik Badan Usaha di kota Bandung. Pada tanggal 12/10/2016, pukul 16.00, WIB.

¹⁵ Wawancara langsung dengan JP, orang perseorangan di kota Bandung. Pada tanggal 26/10/2016,

suatu badan usaha, orang yang tidak terdaftar atau bahkan tidak memiliki badan usaha dapat mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa. Dari satu pekerjaan pengadaan atau pekerjaan kontruksi badan usaha atau orang perseorangan bisa mendapatkan keuntungan maksimal 20% dari total nilai pekerjaan dan untuk pekerjaan konsultasi atau pekerjaan lainnya bisa mendapatkan keuntungan maksimal 30% dari jumlah anggaran proyek. Disini dapat dilihat bahwa hubungan antar aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung masih dapat menimbulkan korupsi.

Berdasarkan penjelasan tentang struktur dan hubungan aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di atas, bahwa sistem pengadaan barang dan jasa belum dapat menghilangkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber yang diwawancarai dalam menelusuri permasalahan penelitian ini bahwa KKN masih dilakukan oleh aktor-aktor dalam pengadaan barang dan jasa. Maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apa dan bagaimana KKN tersebut dapat terjadi. Berdasarkan analisis sistem pengadaan barang dan jasa dari aktor dan hubungan antar aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya di kota Bandung. Sehingga anggaran pemerintah dapat diselamatkan dan dialokasikan untuk pembangunan. Mengacu pada uraian di atas maka judul penelitian ini adalah “ Analisis Aktor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kota Bandung “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari berbagai sumber yang telah dijelaskan di atas bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah masih memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme oleh para aktor yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di kota Bandung. Secara khusus penelitian ini ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana hubungan antar aktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di kota Bandung”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Memetakan aktor yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di kota Bandung.
2. Menganalisis fungsi masing - masing aktor dalam pengadaan barang dan jasa di kota Bandung.
3. Menganalisis hubungan aktor dalam pengadaan barang dan jasa di kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mendapatkan data faktor penyebab terjadinya KKN dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kota Bandung, dalam hal ini yaitu:
 - a. Aktor mana yang fungsional dan aktor mana yang kurang fungsional dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung.

- b. Hubungan Aktor mana yang relevan dan hubungan aktor mana yang kurang relevan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Bandung.
2. Mengajukan alternatif solusi untuk menghilangkan KKN dalam sistem pengadaan barang jasa pemerintah di kota Bandung.

1.5 Sistem Penulisan

Dalam penelitian ini membahas Analisis Aktor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di kota Bandung, dilihat dari identifikasi aktor, peran dan tugas dari para aktor, dan hubungan antar aktor. Untuk itu sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian pustaka, Bab III Metodologi penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Analisa dan Interpretasi Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran.